

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 selesai disusun sesuai yang direncanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diatur dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa setiap unit kerja wajib melaporkan hasil kinerja program, kegiatan dan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan : (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman, dan halal untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat; (4) Memantapkan pasar pangan secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengakses pangan yang bersifat pokok. Upaya untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan tersebut, kemudian dijabarkan dalam kegiatan berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan selama tahun 2024, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024, yang secara umum target Indikator sasaran telah tercapai.

Capaian kinerja tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, serta dukungan pemangku kepentingan mulai dari pusat hingga ke tingkat lapangan, baik institusi pemerintah, swasta maupun petani.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Muara Sabak, 19 Februari 2024  
Kepala Dinas



**AJAR ALAMSYAH,SE**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19801122 200604 1 009

# DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	i	
Daftar Isi.....	iii	
Daftar Tabel.....	iv	
Ikhtisar Eksekutif.....	v	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>		
A. Tugas Pokok dan fungsi.....	1	
B. Struktur Organisasi.....	2	
C. Sumberdaya Aparatur Daerah.....	5	
D. Maksud dan Tujuan .....	7	
E. Sistematika.....	7	
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>		
2.1. Rencana Strategis .....	9	
2.1.1. Visi dan Misi.....	10	
2.1.2. Tujuan dan Sasaran .....	10	
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	11	
2.1.4. Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	17	
2.1.5. Casceding dan Pohon Kinerja .....	20	
2.1.6. Rencana Aksi .....	33	
2.2. Keuangan Tahun 2024.....	42	
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	42	
2.4. Indikator Kinerja Utama.....	43	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>		<b>44</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	44	
3.1.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024.....	44	
3.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	47	
3.1.3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra .....	48	
3.1.4. Realisasi dan Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional.....	49	

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan lainnya.....	50
3.1.6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	54
3.2. Realisasi Keuangan .....	54
3.3. Perbaikan Rencana Kinerja.....	60
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	61
4.2. Rekomendasi.....	61

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel	2.1	Tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Dinas Ketahanan .....	13
Tabel	2.2.1	Alokasi Belanja dan Pendapatan Tahun 2024 .....	42
Tabel	2.3.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	43
Tabel	3.1.1	Skala Nilai Perangkat Daerah.....	44
Tabel	3.1.2	Penjelasan Hasil Perhitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024.....	46
Tabel	3.1.3	Target Out Come Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024.....	47
Tabel	3.1.4	Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target RPJMD Dalam Renstra .....	48

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja selama tahun 2023 dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 000.8.6.3/30/astda.org/2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah. Adapun teknis penyusunannya berpedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Bab II Pasal 2),bidang kewenangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan adalah ***melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan bidang serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan,pengawasan dan pemantauan, pengkajian, analisis dan pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam upaya menjamin Ketahanan Pangan Kabupaten.***

Sejalan dengan Rencana Strategis tahun 2021-2026 maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 2(dua) tujuan yang dijabarkan dalam 5 indikator Kinerja dalam melaksanakan program kegiatan di tahun 2024 Selanjutnya sasaran tersebut diwujudkan dalam **4 (empat) Program Utama** dan **1 (satu) Program Pendukung** dengan **14 (empat belas) kegiatan dan 41 ( empat puluh satu ) subkegiatan**. Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 berhasil dengan baik.

Keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai Misi Nomor 1 (satu) yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan sasaran : “ **Peningkatan Ketahanan Pangan**”

yang mana misi tersebut bertujuan untuk “ **Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan perikanan**”. Khusus Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan tugas mengkoordinasikan peningkatan produksi dan kegiatan lainnya sehingga aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi dapat dilaksanakan seoptimal mungkin sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Untuk dapat menjalankan proses tersebut di atas, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana kegiatan dimaksud selain sebagai upaya menjalankan tupoksi juga untuk menjalankan capaian-capaian baik program ataupun kegiatan, sedangkan Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan pangan tahun 2024. Tuntutan adanya Laporan Kinerja ini berangkat dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak- pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Kendala yang paling menonjol adalah masih terbatasnya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai lembaga yang berfungsi untuk mempersiapkan bahan koordinasi dan

memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan Kabupaten.

Untuk mengatasi masalah/kendala tersebut bukanlah hal yang mudah karena untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil masih belum bisa diupayakan dari instansi terkait serta pengadaan sarana dan prasarana butuh biaya yang cukup mahal bila dilihat dari kondisi anggaran daerah yang cukup terbatas sekarang ini.

Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala di atas, antara lain menjaga dan memelihara inventarisasi sarana dan prasarana yang ada, menjalin hubungan yang harmonis dengan Instansi terkait di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Provinsi dalam peningkatan Ketahanan Pangan serta memfokuskan dan menajamkan program dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam tahun Pertama RENSTRA 2021-2026 ini diukur dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya Kesenjangan Kinerja (Performance Gap) antara rencana kinerja dan realisasinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan

dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dengan kategori capaian dengan rincian sebagai berikut:

N o	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capain	Katagori Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Ketersediaan, konsumsi pangan B2SA dan keterjangkauan bagi Masyarakat	1 Ketersediaan Konsumsi Energi	2.140	2.117	98,93	Sangat Baik
		2. Skor PPH	92,5	93,5	101,08	Sangat baik
2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 .Nilai IKM	88,30	88,14	99,82	Sangat Baik

Hasil pengukuran kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa pencapaian indikator kinerja yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 adalah Sangat baik. Sedangkan untuk penyerapan anggaran adalah (98,82 %) dari dana sebesar **Rp. 4.849.386.107,00** dan teralisasi sebesar Rp.4.792.110.955,00.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dasar Hukum pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu unit kerja setingkat Eselon II dalam struktur organisasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 (Bab II Pasal 2), bidang kewenangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan adalah **melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan, pengawasan dan pemantauan, pengkajian, analisis dan pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam upaya menjamin Ketahanan Pangan Kabupaten**. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2012 sebagai perubahan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 200 Tahun 2008 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Ketahanan Pangan juga bertugas sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada:

- a). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999 dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan;
- b). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- c). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 2. Tugas Pokok

Menurut Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas Pokok Membantu Bupati Tanjung Jabung Timur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

## 3. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai Fungsi :

1. Merumuskan kebijakan Teknis di bidang Ketahanan Pangan;
2. Penyelenggaraan ketersediaan Pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Penyelenggaraan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi, pangan, cadangan pangan penganeka ragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan Administrasi Dinas Ketahanan pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang Ketahanan pangan yang diberikan oleh Bupati.

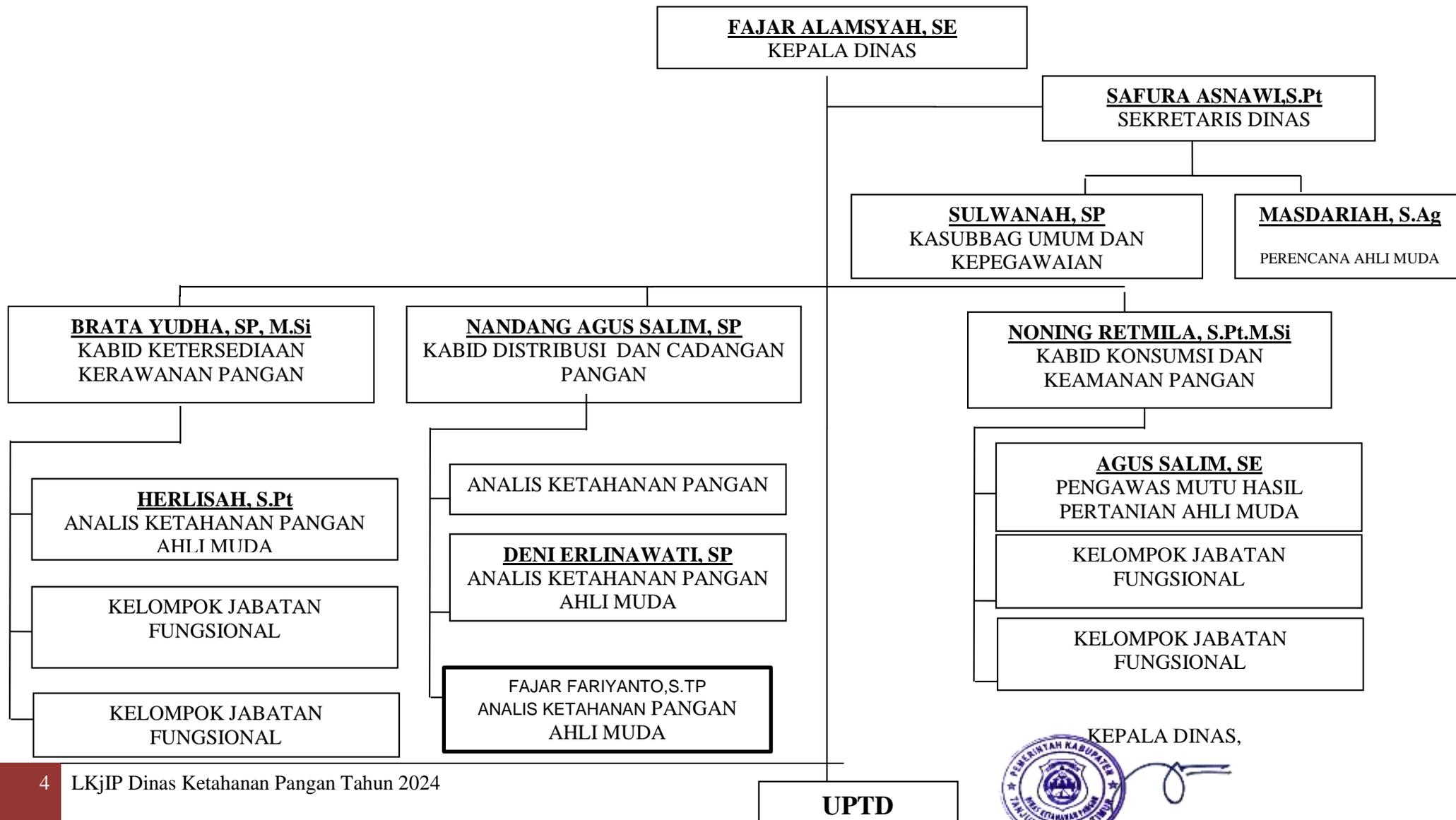
## B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 1 (Satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 3 (Tiga) Kepala Bidang dengan Rincian sebagai berikut :

- ❖ Kepala Dinas
- ❖ Sekretaris Dinas
  - Kasubbag umum dan Kepegawaian
  - Staf Fungsional Perencana Ahli Muda

- ❖ Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
  - Staf Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- ❖ Kepala Bidang Distribusi Pangan
  - Staf Fungsional Analisis Ketahanan Pangan
- ❖ Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan.
  - Staf Fungsional Analisis Ketahanan Pangan

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
PER 31 DESEMBER 2024**



KEPALA DINAS,



**FAJAR ALAMSYAH, SE**  
NIP. 19801122 200604 1 009

### C. SUMBER DAYA APARATUR DAERAH

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember Tahun 2024 memiliki sumber Daya Aparatur sebanyak 21 (Dua puluh satu) Orang. Dari Jumlah tersebut 6 (enam) Orang Pejabat Struktural, Staf fungsional Penyetaraan berjumlah 5 (lima) orang sedangkan sisanya 10 (sepuluh) Orang merupakan staf Fungsioal Umum. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya Pegawai, jumlah Sumber Daya Aparatur belum cukup memadai untuk kebutuhan, sedangkan ditinjau dari kualitas dan tingkatan pendidikan, belum cukup memadai untuk kebutuhan yang ada dan perlu peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pengembangan wawasan dan Keterampilan dengan mengikut sertakan pegawai pada diklat dan sekolah dimasa yang akan datang.

Rincian secara lengkap Sumber daya Aparatur Daerah yang di miliki Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat di lihat pada tabel berikut Ini :

N 0	Uraian	Golongan				Pendidikan						
		IV	III	II	I	S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SLTP
1	Struktural											
	Kepala Dinas	1					1					
	Sekretaris Dinas	1					1					
	Kasubbag umum Dan Kepegawaian		1				1					
	Staf Fungsional Perencana	1					1					
	Kepala Bidang Konsumsi & Keamanan Pangan	1				1						
	Staf Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian		1				1					
	Kepala Bidang Ketersediaan Pangan & Kerawanan Pangan	1				1	1					
	Staf Fungsional Analis Ketahanan Pangan		1				1					
	Kepala Bidang Distribusi Pangan	1					1					
	Staf Fungsional Analis Ketahanan Pangan		2				2					
	Jumlah	6	6	-	-	2	10					
2	Staf Fungsional Umum		6	3	-	-	6	2			1	
	Jumlah	1	6	3	-	-	6	2			1	
	Jumlah	7	11	3		2	16	2			1	

## **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Bupati Tanjung Jabung Timur selaku pimpinan tertinggi di daerah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 dan juga untuk memenuhi kewajiban Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024 dan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan LKjIP Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP 2024**

Sistematika penyusunan LKjIP berdasarkan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2015 yaitu tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. *Capaian Kinerja Organisasi***

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
- 6) Analisis atau efisien penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kerja.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV. Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode lima tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, isu strategis, kebijakan, strategi, dan program kegiatan pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan; dan indikator-indikator kinerja Dinas, berorientasi pada hasil yang akan dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dan mungkin terjadi serta melakukan antisipasi terhadap perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Rumusan pokok-pokok Rencana Strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

##### 2.1.1. VISI DAN MISI

Visi Bupati dan wakil Bupati Tanjung Jabung Timur adalah **meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAKYAT)** dengan misi bupati dan wakil Bupati Tahun 2021 s/d 2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan.
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan lestari.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.

Dari 4 (empat) misi Bupati dan wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tersebut guna mendukung misi diatas Dinas Ketahanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menelaah misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah pada misi ke 1(satu) yang berbunyi “ Mewujudkan masyarakat yang bertumpu pada sector Pertanian dan perikanan, dan pada misi yang ke 4(Empat) yang berbunyi : Mewujudkan reformasi

birokrasi guna mendukung Peningkatan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan Harmonis.

## **2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN**

### **➤ Tujuan**

Merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan yang dituangkan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 dan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2000. serta Dasar Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Tujuan ini ditetapkan harus mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif namun harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Selanjutnya secara prinsipil tujuan tersebut akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Adapun tujuan dari perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021-2026 adalah “Meningkatkan Ketahanan Pangan”.

### **➤ Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai, sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Adapun sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu:

1. Peningkatan Ketersediaan, konsumsi pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat ;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas kinerja dan keuangan.

### 2.1.3 STARATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya pencapaian tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### ➤ STRATEGI

Pada dasarnya dalam suatu lingkungan organisasi terdapat faktor lingkungan internal dan eksternal yang selalu dimiliki dan dihadapi Dinas Ketahanan Pangan.

1. Identifikasi lingkungan internal Dinas Ketahanan Pangan
  - a. Kekuatan (strengths) Kekuatan adalah suatu kondisi yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan sehingga mampu melakukan semua Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 tugas dengan baik. Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu berupa potensi yang dapat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kekuatan disini adalah sebagai berikut :
    - Adanya dukungan produk perundang-undangan
    - Adanya program kerja, kegiatan dan dana
    - Adanya dukungan program dan kebijakan dari pemerintah pusat
  - b. Kelemahan (weaknesses) Kelemahan adalah suatu kondisi yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan yang mengakibatkan tidak terlaksananya tugas dan fungsi dengan baik, kelemahan yang dimiliki adalah sebagai berikut :
    - Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia masih belum sepenuhnya memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
    - Sarana dan prasarana belum memadai

- Kurangnya data dan informasi yang aktual dan valid
2. Identifikasi Lingkungan Eksternal Dinas Ketahanan Pangan
- Lingkungan eksternal yang dimaksud disini adalah yang menyangkut aspek-aspek administrative, birokratis, sosial, yang dapat berpengaruh terhadap Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan tupoksi di bidang perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lingkungan eksternal ini meliputi lingkungan sosial dan lingkungan tugas di luar tugas dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan.
- a. Peluang (Opportunities) Peluang yang dimiliki dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dapat diidentifikasi sebagai berikut :
- Tersedianya potensi sumber daya alam
  - Peluang pasar yang masih besar
  - Peran aktif masyarakat
- b. Ancaman / Tantangan (Threats) Upaya dalam melaksanakan tujuan untuk mencapai misi akan menghadapi ancaman/ tantangan dan dapat diidentifikasi sebagai berikut :
- Rendahnya kesadaran masyarakat akan upaya diverifikasi pangan dan keamanan pangan
  - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan B2SA
  - Masih lemahnya kelembagaan kelompok tani.
- Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas maka strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Pemantauan ketersediaan pangan, distribusi dan stabilitas harga, pembinaan Mutu dan keamanan Pangan serta koordinasi lintas sekte ketahanan pangan.
  2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan

➤ **KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan

memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/ memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:

1. Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan, diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan ;
2. Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah;
3. Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan ;
4. Penyediaan Stok cadangan pangan;
5. Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan;
6. Peningkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas Kinerja dan Keuangan..

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dengan RPJMD tercantum pada Tabel berikut :

**Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026**

**Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

**Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat sejahtera yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1 Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	1 Meningkatkan pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat program Penanganan Daerah RawanPangan
				Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat						

3	Meningkatkan Sarana prasarana infrastruktur Lumbung Pangan dan sarana pendukungnya serta penguatan cadangan pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
		Penyediaan Stok cadangan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat					
4	Meningkatkan Pengawasan Keamanan pangan dan Mutu pangan segar asal tumbuhan/olahan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Program Pengawasan dan Keamanan pangan					

Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis												
2	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota					

#### **2.1.4. PROGRAM , KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN**

Program Dinas Ketahanan Pangan mencerminkan tugas dan fungsi yang berisikan kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut terdiri dari:

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

###### **1.1. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja**

Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

1.1.2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

1.1.4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD.

1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.

1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

###### **1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :**

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan.

1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD.

###### **1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :**

1.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

###### **1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :**

1.4.1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

- 1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga.
- 1.4.6. Fasilitas Kunjungan Tamu.
- 1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :
  - 1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :
  - 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :
  - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas Jabatan .
  - 1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.
  - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya.

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**

- 2.1. Kegiatan Penyediaan infratraktur dan seluruh Pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan sebagai berikut :
  - 2.1.1. Penyediaan infrastruktur Pendukung Kemandirian pangan lainnya.

## **3. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT.**

- 3.1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Dengan subkegiatan sebagai berikut :

- 3.1.1. Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya.
  - 3.1.2. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.
  - 3.1.3. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota.
  - 3.1.4. Pemantauan Stok Pangan.
  - 3.1.5. Penyediaan informasi harga pangan Tingkat Produsen dan konsumen wilayah Kabupaten/Kota .
  - 3.1.6. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota.
  - 3.1.7. Koordinasi dan sinkronisasi Pemantaun Stok Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis.
- 3.2. Kegiatan Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan subkegiatan sebagai berikut :
- 3.2.1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
  - 3.2.2. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota .
- 3.3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi dengan subkegiatan sebagai berikut :
- 3.3.1. Penyusunan dan Penetapan target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun.
  - 3.3.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis Sumber Daya lokal.
  - 3.3.3. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi Per Kapita per Tahun.

#### **4. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**

- 4.1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan subkegiatan sebagai berikut :
  - 4.1.1. Penyusunan, Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
- 4.2. Kegiatan Penanganan Kerawanan pangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan subkegiatan sebagai berikut :

4.2.1. Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan kerawanan pangan dan gizi Kabupaten/Kota

4.2.2. Pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi

4.2.3. Penyusunan Peta situasi Kewaspadaan Pangan dan gizi Kabupaten/Kota.

## **5. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**

5.1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan sebagai berikut :

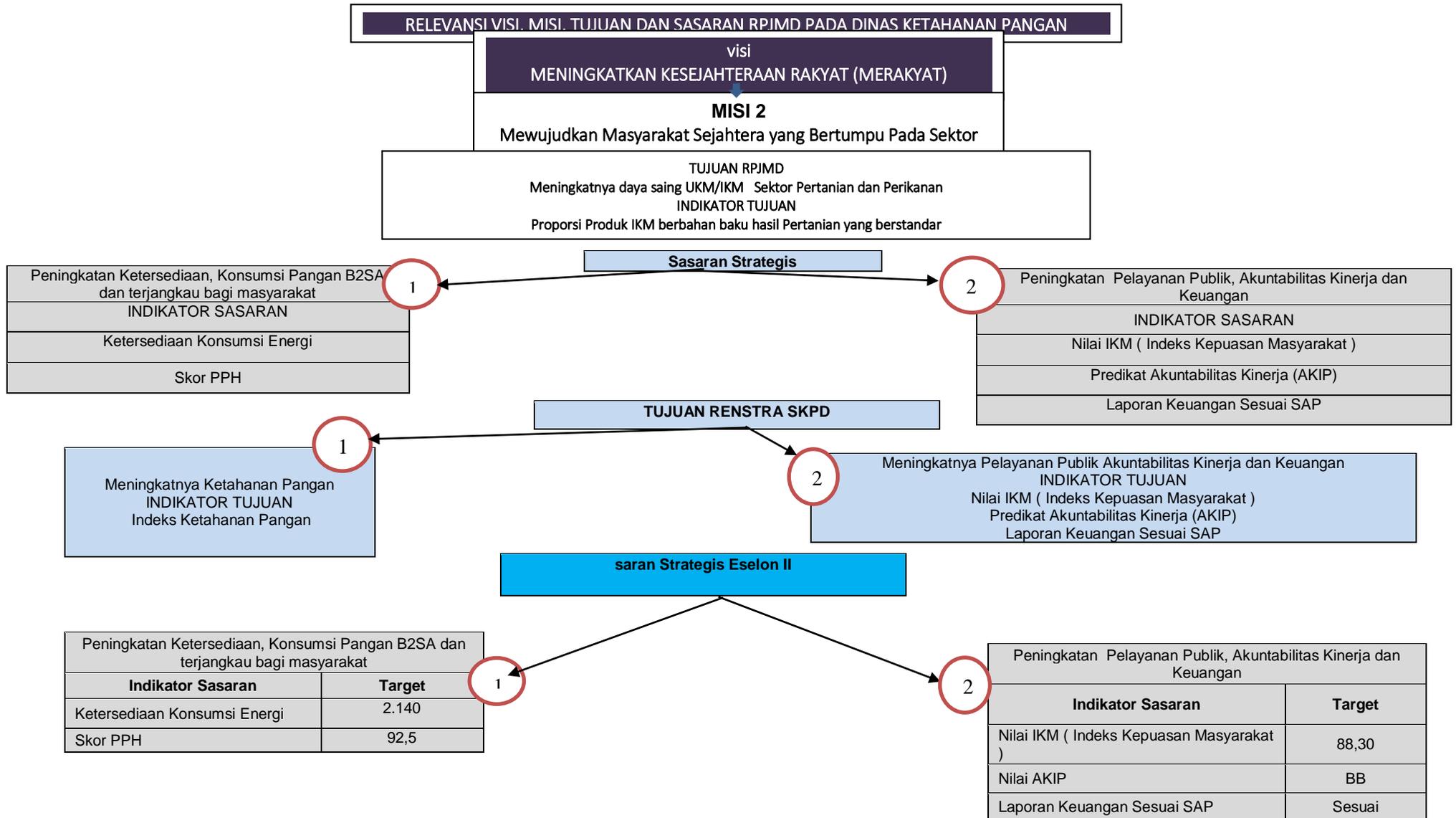
5.1.1. Rekomendasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota.

### **2.1.5. CASCEDING DAN POHON KINERJA.**

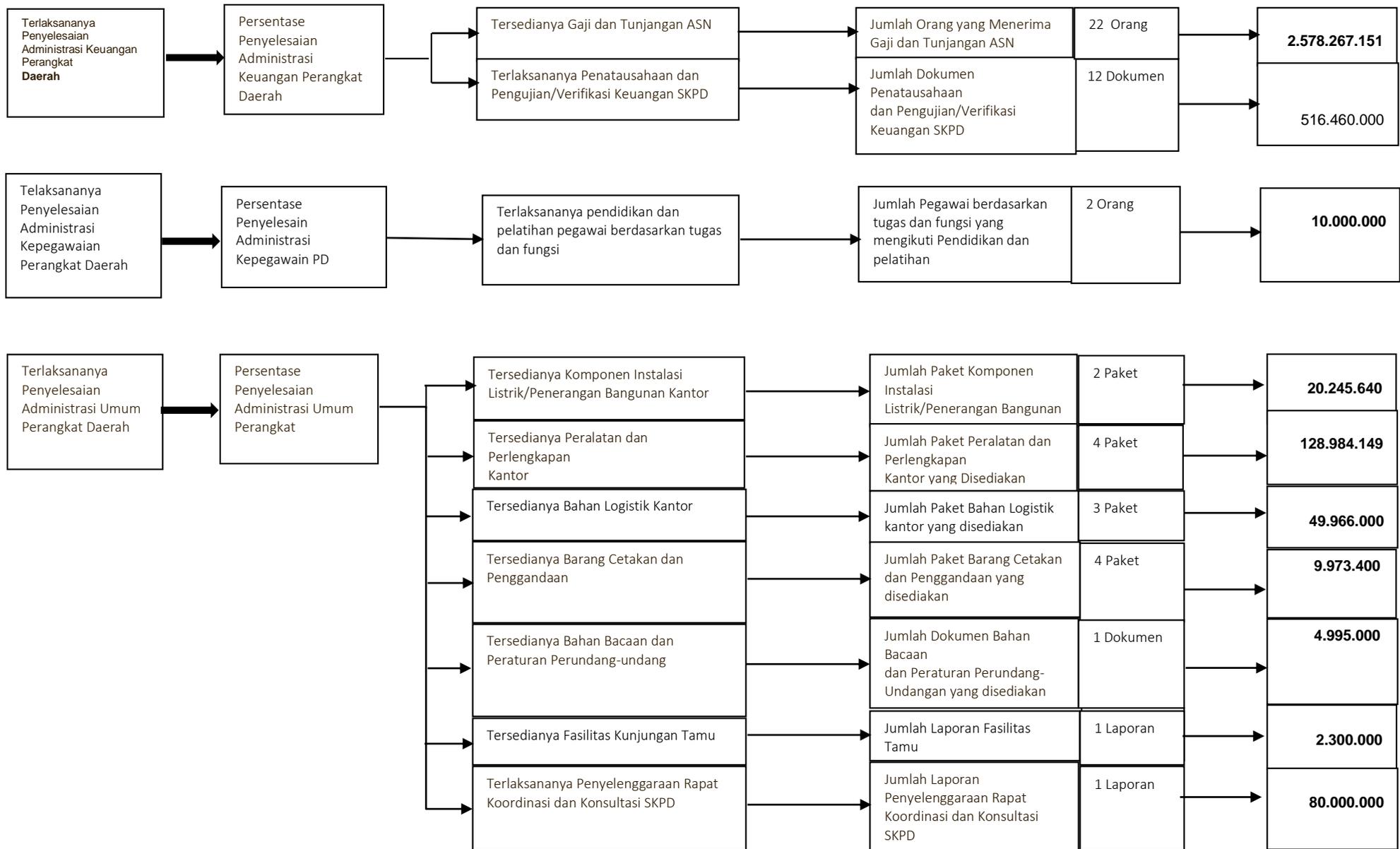
Cascading dan pohon kinerja diaplikasi sebagai proses penurunan dan penyelarasan target-target kinerja Dinas Ketahanan Pangan pada seluruh level dalam organisasi secara hirarkis dan tertuang sebagai berikut:

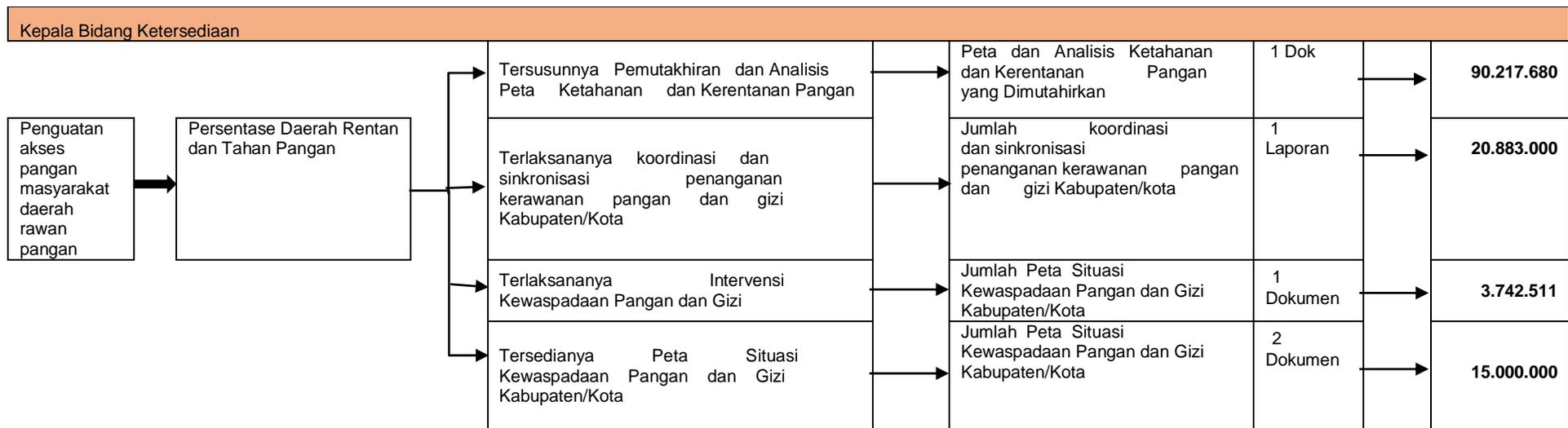
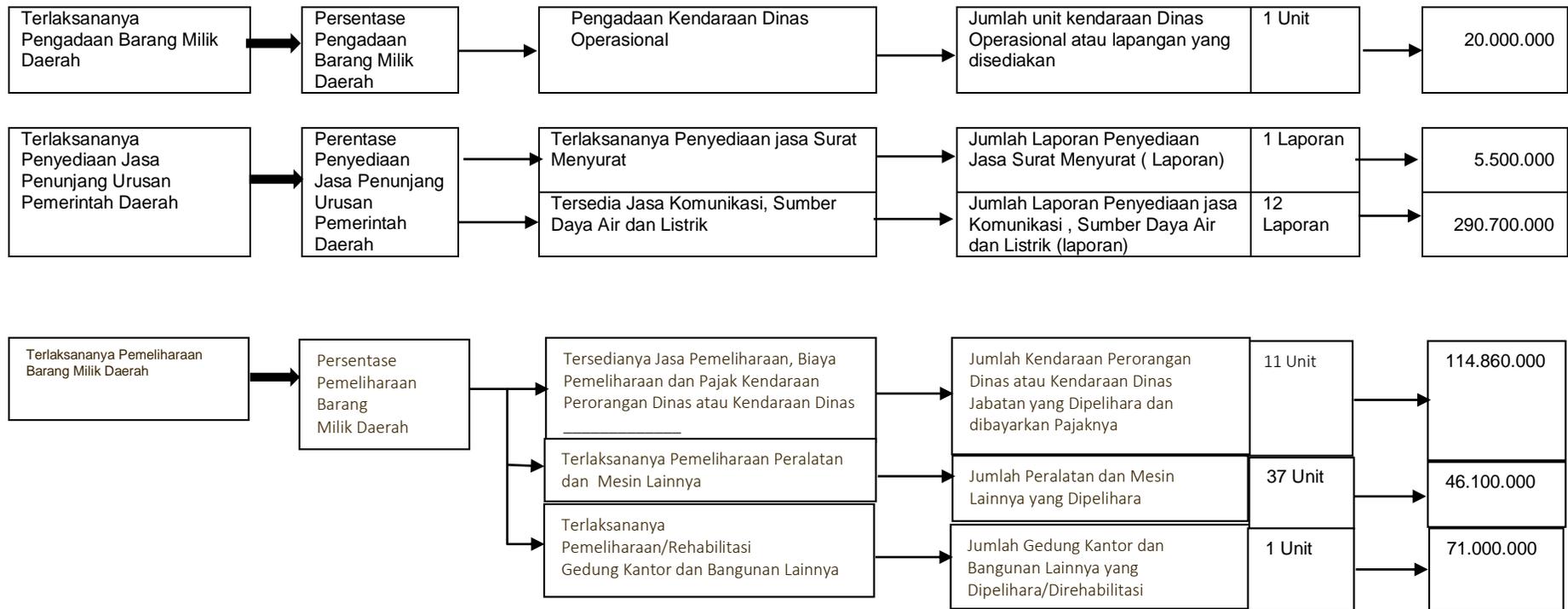
# CASCEDING

CASCEDING TAHUN 2024  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



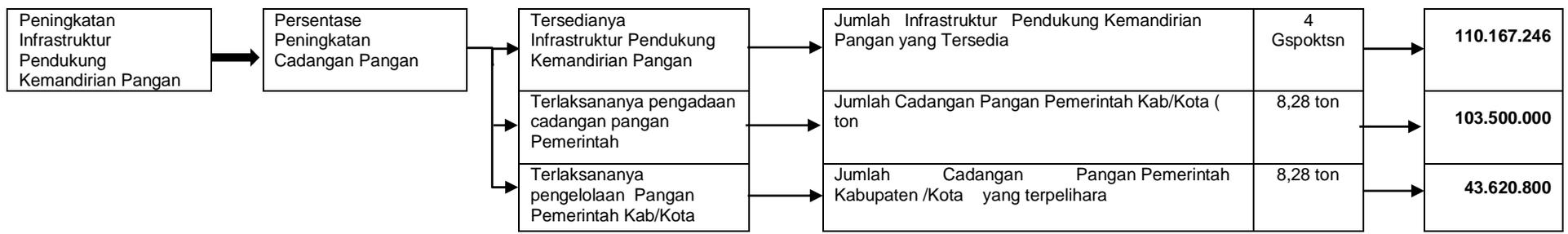
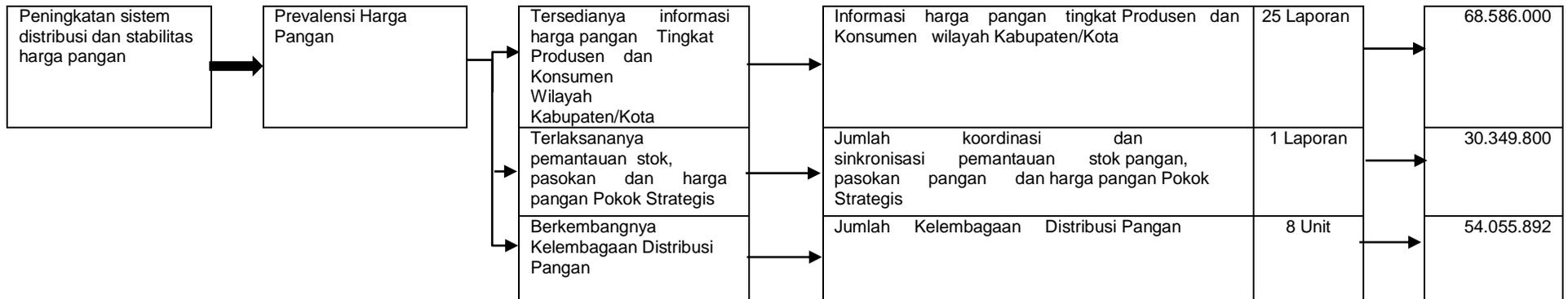
ESELON III			ESELON IV				
Sasaran kegiatan		Indikator Kinerja	Sasaran Subkegiatan		Indikator Subkegiatan	Target	Anggaran
Sekretaris							
Terlaksananya Keselarasan Dokumen Perencanaan Penanganan dan evaluasi perangkat daerah	→	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Penanganan dan evaluasi perangkat daerah	Tersusnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	→	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.599.900
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	→	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	1.025.000
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	→	umlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	1.325.000
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	→	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	1.025.000
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	→	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	1.424.900
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	→	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	5.878.700
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	→	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000







**Kepala Bidang Distribusi**





Kepala Dinas Ketahanan Pangan



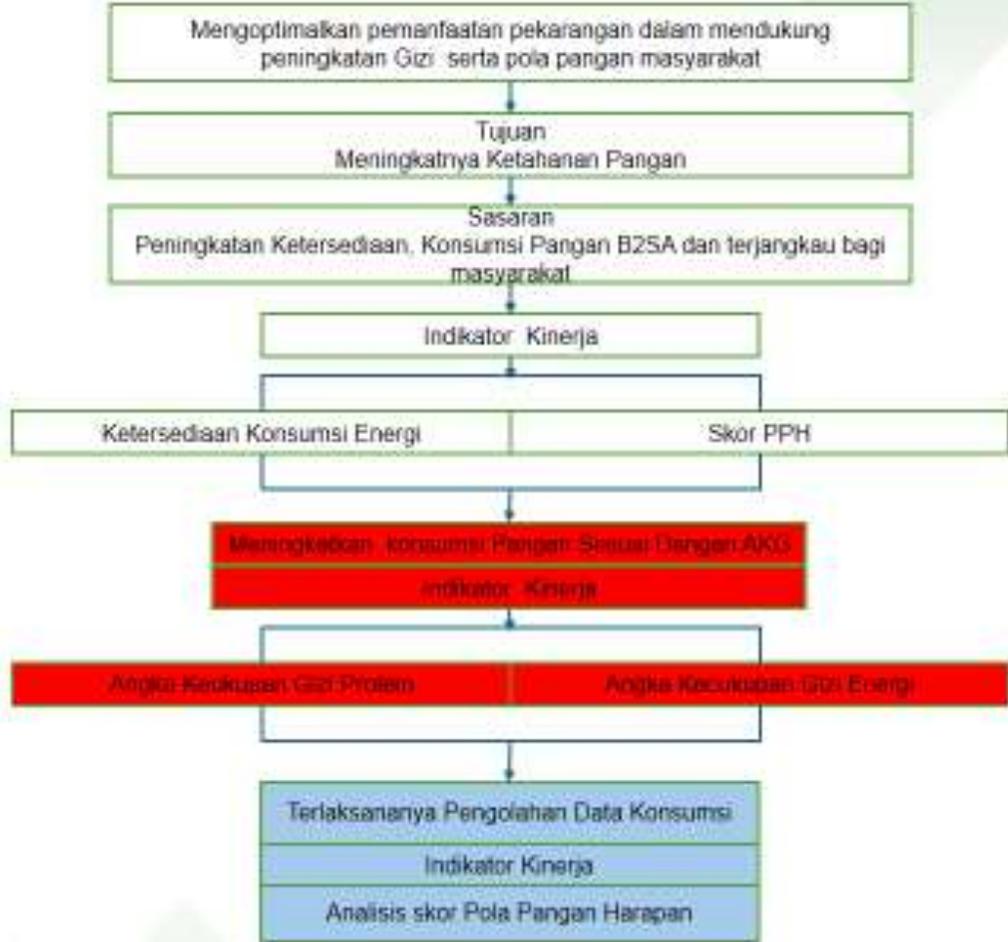
FAJAR ALAMSYAH, SE  
Pembina Tk/IV b  
NIP. 19801122 200604 1 009

POHON KINERJA  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2021-2026

PERMASALAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN



Permasalahan 1



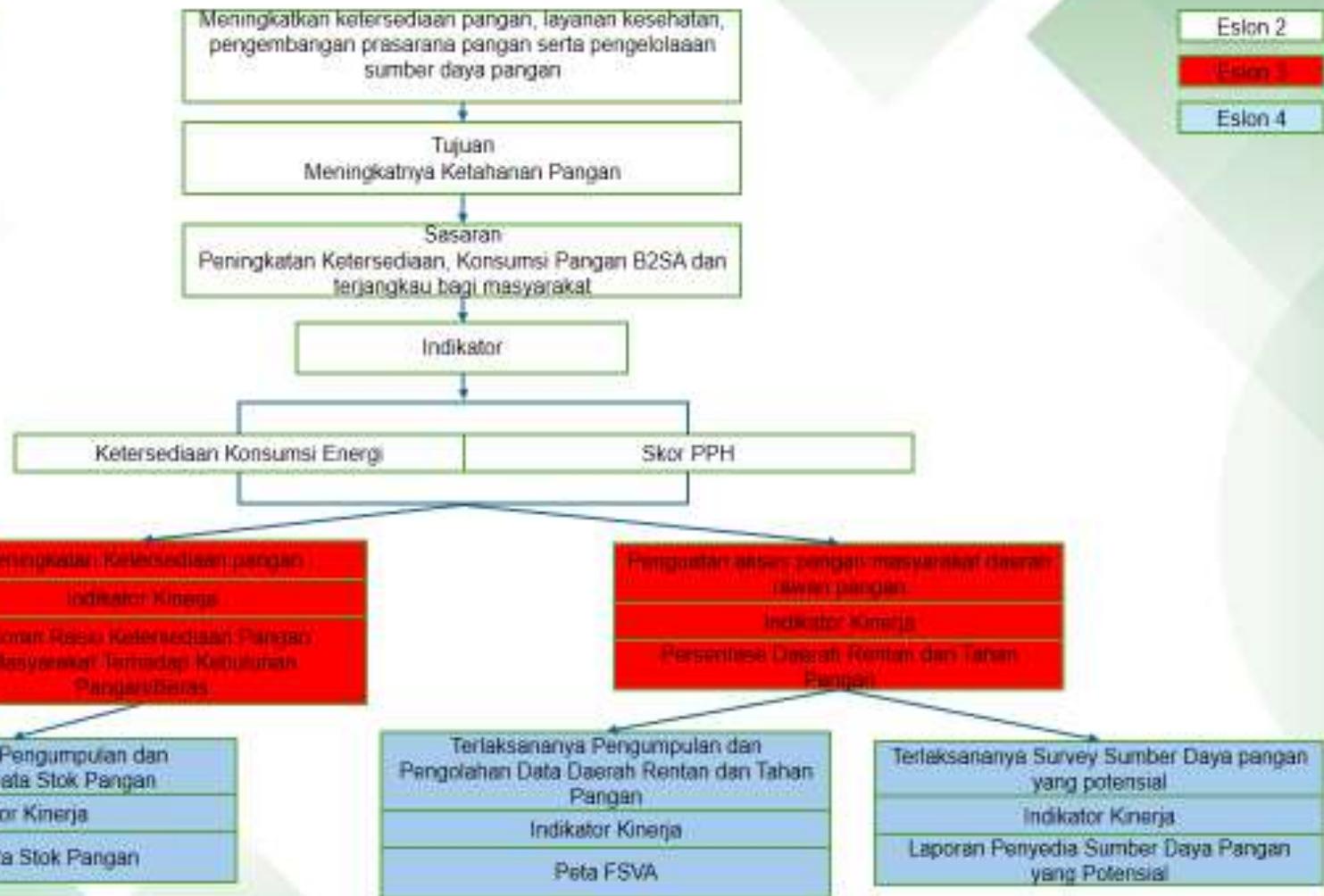
- Eslon 2
- Eslon 3
- Eslon 4

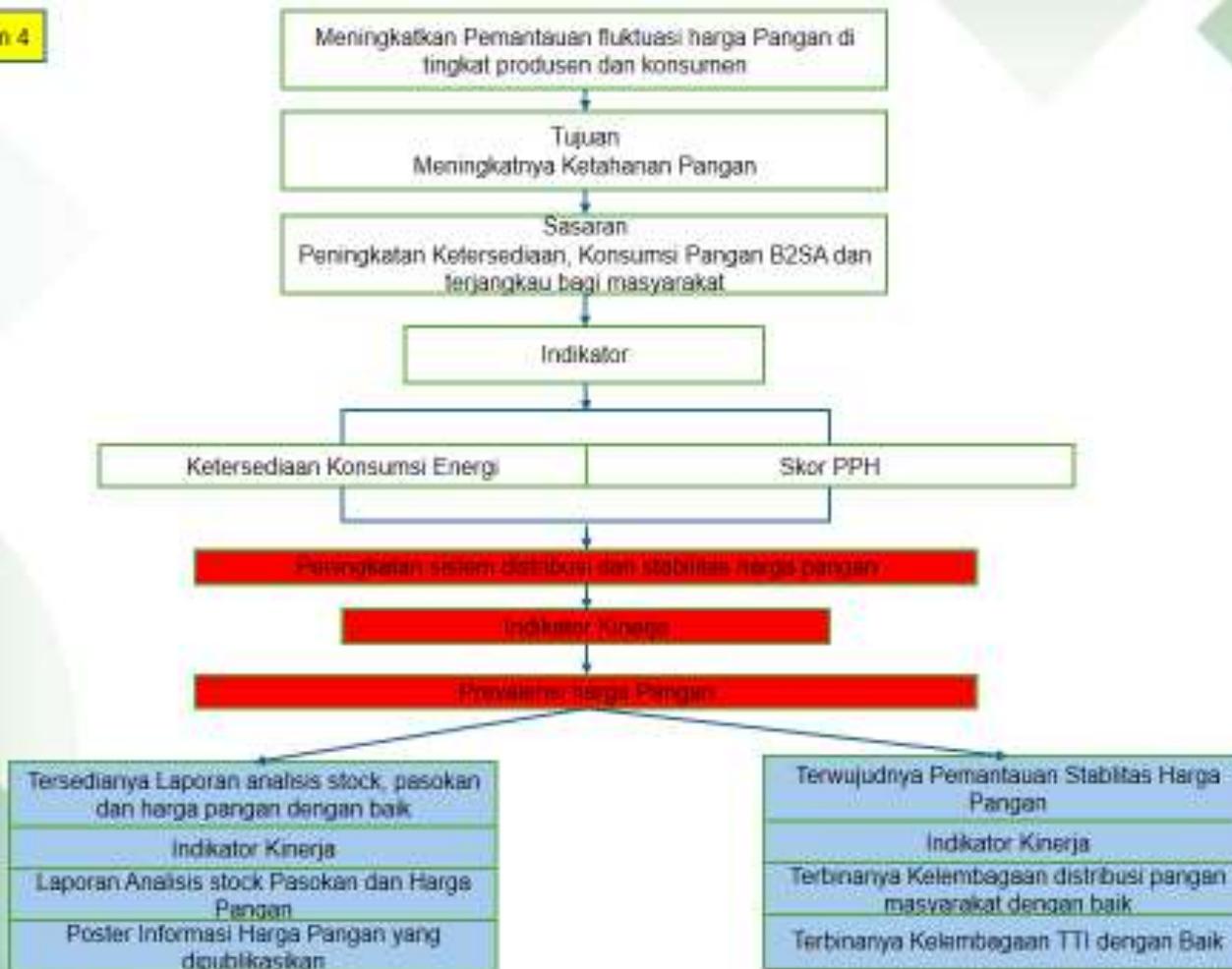
Permasalahan 2



- Esion 2
- Esion 3
- Esion 4

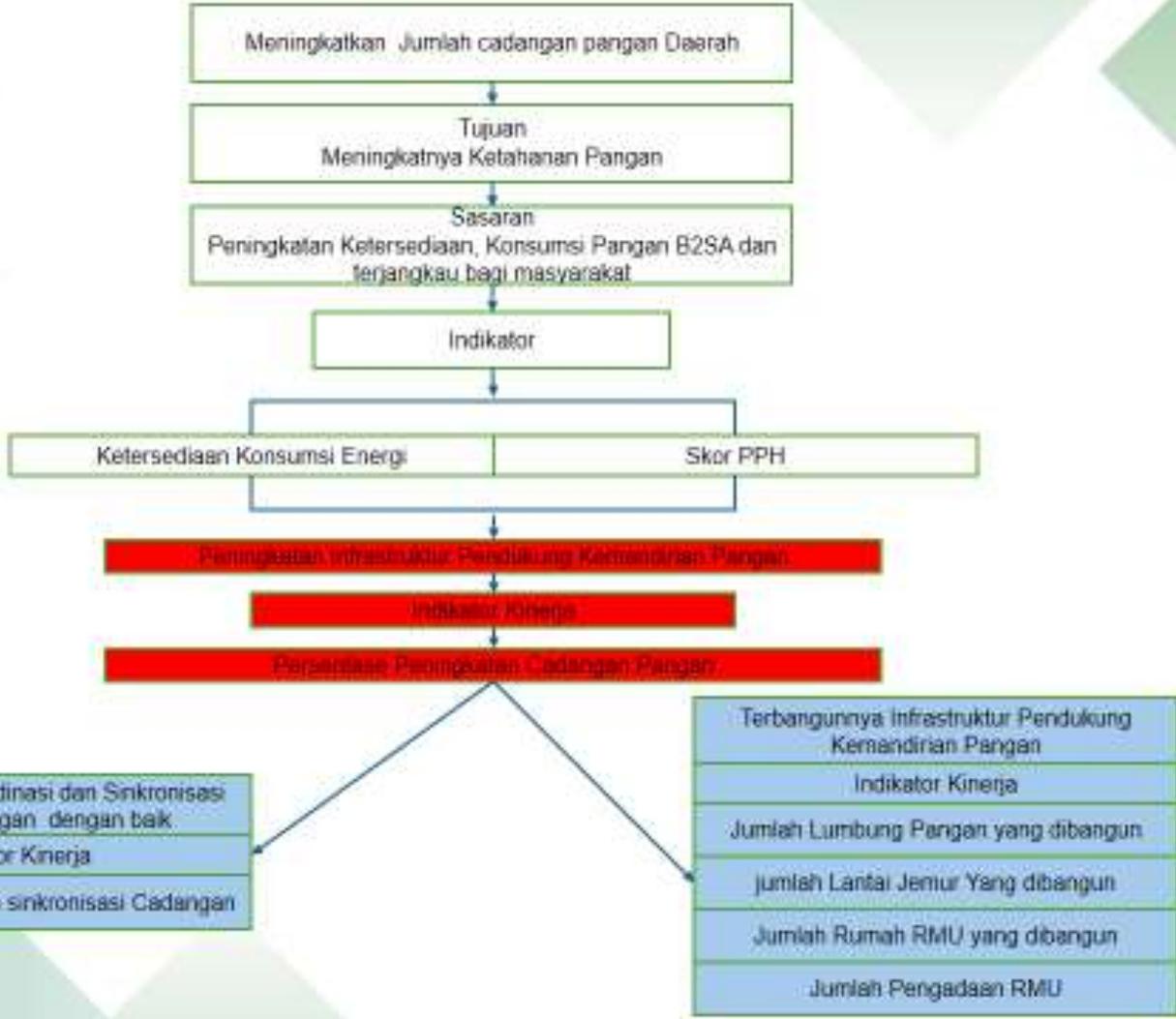
Permasalahan 3





Permasalahan 5

- Eslon 2
- Eslon 3
- Eslon 4



### **2.1.6. Rencana Aksi**

Tujuan, sasaran, program serta tolak ukur untuk mencapai indikator tersebut diatas dituangkan dalam rencana aksi Dinas Ketahanan Pangan, yang tertuang sebagai berikut:

## RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				No	Aksi Kegiatan	JADWAL KEGIATAN												Target Output (Keluaran)	Penggungjawab	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/subkegiatan	Jumlah Anggaran (Dalam Ribu Rp)
		TW	TW	TW	TW			TR1			TR2			TR3			TR4							
		1	2	3	4			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Peningkatan Ketersediaan Konsumsi pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	Ketersediaan Konsumsi				2,140													2,140	Dinas Ketahanan Pangan					
	Skor PPH				92,5													92,5						
						1	<b>Peningkatan Penyediaan infrastruktur lumbung Pangan</b>												Bid. Distribusi Pangan	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</b>	Persentase Penyediaan Infrastruktur lumbung	<b>109.167.346</b>		
						1.1	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota												Bidang Distribusi Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan	110.167.246		
						1.1.1	Terlaksananya Rapat Lembaga Pangan Masyarakat serta pemberian karung gabah kepada gapoktan	√			√			√					Bidang Distribusi Pangan	1 Penyediaan Infrastruktur pendukung Kemandirian Pangan	jumlah infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	110.167.246		
					2	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat													Bid. Distribusi Pangan; bid. Ketersediaan; bid.konsumsi dan keamanan pangan	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	Konsumsi Energi Skor PPH	<b>552.821.080</b>		



2.2	Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi data serta Menyediakan beras Cadangan Pangan																	Bid. Distribusi Pangan	Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cadangan Pangan	147.120.800
2.2.1	Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah	√			√			√			√							Bid. Distribusi Pangan	1 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang Terpelihara	43.620.800
2.2.2	Pembelian beras cadangan pangan pemerintah									√								Bid. Distribusi Pangan	2 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	103.500.000
2.3	Melaksanakan survey Pola Pangan Harapan dan Sosialisasi Kader Pangan dan Pangan Lokal															100%		Bid. Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita pertahun	Persentase Capaian Konsumsi Pangan	110.804.588
2.3.1	Terlaksananya Penyusunan Target Konsumsi Pangan							√					√					Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1 Penyusunan dan Penetapan target konsumsi Pangan perkapita Per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5.347.300
2.3.2	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekekaragan konsumsi pangan berbasis sumber daya pangan lokal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	2 Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekekaragan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekekaragan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	78.657.288
2.3.3	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita pertahun	√			√			√				√						Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	3 Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan evaluasi Konsumsi Per kapita Per tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	26.800.000
3	terlaksananya Pengawasan daerah rawan pangan																	Bidang Ketersediaan Pangan	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	Persentase Penanganan Daerah RawanPangan	<b>129.843.191</b>
3.1	Koordinasi dan sinkronisasi data																	Bidang Ketersediaan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	90.217.680,-

					3.1.1	tersusunnya pemutahiran dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√			1	Subkegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	90.217.680	
					3.2	Melaksanakan intervensi kewaspadaan Pangan dan Gizi, serta Penyusun peta.												Bidang Ketersediaan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penyelesaian Peta	39.625.511	
					3.2.1	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi	√			√			√					Bid. Ketersediaan Pangan	1 Koordinasi dan sinkronisasi penanganan Kerawanan Pangan dan gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	20.883.000	
					3.2.2	Terlaksananya intervensi kewaspadaan pangan dan gizi							√					Bid. Ketersediaan Pangan	2 Pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	15.000.000	
					3.2.3	Tersusunnya peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Bid. Ketersediaan Pangan	3 Penyusunan Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi Kabupaten/kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/Kota	3.742.511	
					4	Peningkatan Pengawasan pangan segar dan pangan olahan												Bid. Konsumsi dan Keamanan Pangan	<b>Program Pengawasan dan Keamanan Pangan</b>	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan Pangan	73.924.750	
					4.1	Melakukan Pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan dan pangan lokal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Bid. Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan PSAT dan Pangan Lainnya	73.924.750	
					4.1.1	Sosialisasi mutu dan keamanan Pangan serta pengambilan Sampel pangan segar asal tumbuhan ataupun olahan													Subkegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	73.924.750	
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat				88,30												88,30					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)				BB													BB				
	Laporan Keuangan Sesuai SAP				Sesuai													Sesuai				

5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														88,30		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Instansi	3.982.629.840
5.1	Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Bid. Sekretariat Dinas	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.278.500
5.1.1	Tersusnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√														Bid. Sekretariat Dinas	1 Menyusun Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	2.599.900
5.1.2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD						√									Bid. Sekretariat Dinas	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dok).	1.025.000
5.1.3	Tersedianya Dok DPA-SKPD						√									Bid. Sekretariat Dinas	3 koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dok).	1.325.000
5.1.4	Tersedianya Dok DPA-SKPD									√						Bid. Sekretariat Dinas	4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dok).	1.025.000
5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							√								Bid. Sekretariat Dinas	5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dok)	1.424.900
5.1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja									√						Bid. Sekretariat Dinas	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	adalah Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD dan laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja ( Dokumen)	5.878.700

5.1.7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√			√			√			√					Bid. Sekretariat Dinas	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	20.000.000	
5.2	Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																Bid. Sekretariat Dinas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	3.094.727.151	
5.2.1	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				Bidang Sekretariat Dinas	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	adalah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan PNS/ASN	2.583.267.051
5.2.2	Pembayaran Honorarium penanggung Jawab Pengelola keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				Bidang Sekretariat Dinas	2	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD(Dok)	516.460.000
5.3	Melaksanakan Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																Bid. Sekretariat Dinas	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	
5.3.1	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	√															Bid. Sekretariat Dinas	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan( Orang)	10.000.000
5.4	Melaksanakan administrasi Umum Perangkat Daerah																Bid. Sekretariat Dinas	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.464.189	
5.4.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor				√			√									Bid. Sekretariat Dinas	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	20.245.640
5.4.2	Tersedianya Bahan Logistik				√			√									Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	2	Penyediaan bahan Logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	49.966.000
5.4.3	pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	√						√									Bid. Sekretariat Dinas	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	128.984.149
5.4.4	cetakan dan penggandaan				√			√				√					Bid. Sekretariat Dinas	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	9.973.400

5.4.5	tersedianya bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	√			√			√								Bid. Sekretariat Dinas	5	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	4.995.000
5.4.6	terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	√						√			√					Bid. Sekretariat Dinas	6	Fasilitas Kunjungan Tamu	adalah Jumlah poran Fasilitas Kunjungan Tamu ( Laporan)	2.300.000
5.4.7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			Bid. Sekretariat Dinas	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	80.000.000
5,5	Pengadaan Kendaraan Operasional													100%		Bid. Sekretariat		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	20.000.000
5.5.1	Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas													1 unit			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas Oprasional atau Lapangan	20.000.000
5.6	Melaksanakan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															Bid. Sekretariat Dinas		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	296.200.000
5.6.1	Terlaksananya penyediaan Jasa surat menyurat				√			√			√					Bid. Sekretariat Dinas	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan surat menyurat (Laporan)	5.500.000
5.6.2	Tersedianya Jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				Bid. Sekretariat Dinas	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	290.700.000
5,7	Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah															Bid. Sekretariat Dinas		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	231.960.000



## 2.2. KEUANGAN TAHUN 2024

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan dengan anggaran belanja dan pendapatan sebagaimana tabel berikut::

Tabel 2.2.1

### Alokasi Belanja dan Pendapatan Tahun 2024

Uraian	Pagu APBD Murni	Pagu APBD Perubahan
Pendapatan	0	0
Belanja Daerah	4.722.758.377,00	4.849.386.107,00
a. Banja Operasi .	4.576.858.377,00	4.696.486.107,00
b. Belanja Modal	145.900.000,00	152.900.000,00

## 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024 Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 mengacu pada Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021- 2026. Penetapan Kinerja Tahun 2024 selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.3.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan Keterjangkauan bagi masyarakat	Ketersediaan Konsumsi Energi	2.140
		Skor PPH	92,5
2	Peningkatan Pelayanan Publik , akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88,30
		Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	BB
		Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Sesuai

#### 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan indikator kinerja utama yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026, IKU Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Kinerja	Target Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketersediaan , Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	72,21	72,5	73	73,5	74	74,5
			Ketersediaan Konsumsi Energi	2.125	2.130	2.135	2.140	2.145	2.150
			Skor PPH	90,5	91,6	92	92,5	93,1	93,2
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas kinerja dan keuangan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	82	86	88,30	89	90
			Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	B	B	BB	BB	BB	BB
			Laporan Keuangan sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Untuk menilai kekurangan dan keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tangung Jabung Timur, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja memiliki esensi penting dalam evaluasi kinerja yang berdasarkan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasi visinya.

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja bertujuan untuk memberikan penghargaan maupun sanksi kepada pelaksana kegiatan guna meningkatkan kinerja Perangkat Daerah. Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja. Dan pada akhirnya dapat disimpulkan permasalahan dan solusi dalam mengejar pencapaian target kinerja sampai dengan akhir periode renstra 2021-2026.

##### **3.1.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024.**

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tangung Jabung Timur Tahun 2024 memuat capaian target-target yang terukur dari perolehan masing-masing indikator kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kreteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam table di bawah ini :

Tabel 3.1.1. Skala Nilai Perangkat Daerah

No	Jumlah Nilai	Katagori	Keterangan
1	Nilai 85 s.d 100	Sangat Berhasil	<b>Sangat Baik</b>
2	Nilai 70 < 85	Berhasil	<b>Baik</b>
3	Nilai 55<70	Cukup Berhasil	<b>Cukup Berhasil</b>
4	Nilai < 55	Kurang Berhasil	<b>Kurang Berhasil</b>

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan diukur dengan cara **“Maximize Target”** yaitu apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Pencapaian dari sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini merupakan gambaran umum indikator perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD, serta Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penjelasan secara rinci mengenai metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2 Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4
1	Ketersediaan konsumsi Energi	2.140	- Semakin besar capaian keberhasilan konsumsi energy, maka semakin terpenuhinya konsumsi energy masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik. Diharapkan terjadinya penurunan konsumsi beras yang diimbangi konsumsi umbi-umbian.
	Skor PPH	92,5	- Semakin besar capain skor PPH Konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik.
3	Indeks Pelayanan Instansi	88,30	- Semakin besar capaian skor Indeks Pelayanan maka tingkat pelayanan terhadap mutu pelayanan Dinas Ketahanan Pangan sangat baik, sehingga capaian kinerja semakin baik pula ( <i>Maximize Targ.</i>
4	Nilai SAKIP	BB	- Semakin besar realisasi Nilai LKjIP Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan penilaian Inspektorat Kabupaten, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan semakin baik.
5	Nilai Laporan Keuangan	Sesuai	- Semakin besar realisasi Nilai Kinerja, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan semakin baik.

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan

sasaran. Tingkat capaian **Target Outcome** masing-masing indikator kinerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.3. Target Outcome Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Timur Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Fisik (%)
1	Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	Ketersediaan Konsumsi Energi	2.140	2.117	98,93
		Skor PPH	92,5	93,5	101,08
2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas kinerja dan keuangan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,30	88,14	99,82
		Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	BB	BB	BB
		Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Timur , 2024

Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat sebagai berikut yaitu Secara umum diperoleh nilai Pencapaian Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, dapat dimasukkan ke dalam kategori Capaian Kinerja **Sangat Baik**. Penjelasan secara lengkap atas capaian indikator kinerja organisasi perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 .

### 3.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Tahun 2024 merupakan tahun ke-4 RPJMD 2021-2026, Dinas Ketahanan Pangan secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

dan dua tahun sebelumnya secara rinci disampaikan pada tabel berikut: Beberapa hal yang perlu dianalisa dan dievaluasi dalam pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan pada masing-masing sasaran dan indikator sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	REALISASI			Capaian
					2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan	73,5	69,79	70,65	71,22	96,90
		Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	Ketersediaan Konsumsi Energi	2.140	2.345	2.209	2.117	98,93
			Skor PPH	92,5	93,3	95	93,5	101,08
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas kinerja dan keuangan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,30	79,42	86,15	88,14	99,82
			Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	BB	B	BB	BB	BB
			Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

### 3.1.3. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan target jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tertuang dalam pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026. Secara rinci capaian kinerja jangka menengah tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.4**  
Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi Tahun 2024	Capaian Target Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= 11/8 *100
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	Ketersediaan Konsumsi Energi	2,125	2,130	2,135	2,140	2,145	2,150	2.117	98,93
			Skor PPH	90.5	91.6	92	92.5	93.1	93.2	93,5	101,08

2	Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas kinerja dan keuangan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	82	86	88,30	89	90	88,14	99,82
			Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Sesuai							

### 3.1.4. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026 tetap berkaitan pada program yang ada dokumen perencanaan Badan Pangan Nasional Namun untuk penentuan indikator dalam tujuan, sasaran maupun program dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk indikator dalam SPM pada ada 4 bidang antara lain Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan ditujukan untuk memberikan perlindungan hak atas pangan peningkatkan kesejahteraanya. Pemerintah daerah menerapkan SPM Ketahanan Pangan target capaian terdiri 4 jenis pelayanan :

1. Ketersediaan dan cadangan pangan; 2. Distribusi dan akses Pangan; 3. Penganekaragaman dan keamanan pangan; 4. Penanganan Kerawanan Pangan. Capaian pelayanan dasar tersebut diukur dengan 7 indikator yaitu : . Ketersediaan Energi dan protein perkapita; Penguatan Cadangan pangan; ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan; stabilitas harga dan Pasokan; PPH; pengawasan kewanaman Pangan serta penanganan daerah rawan pangan, Capaian pelayanan dasar tersebut diukur dengan 7 indikator yaitu : . Ketersediaan Energi dan protein perkapita; Penguatan Cadangan panga; ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan; stabilitas harga dan Pasokan; PPH; dan pengawasan kewanaman Pangan serta penanganan daerah rawan pangan, sehingga secara nomenklatur tata organisasi akan dibahas oleh Dinas Ketahanan Pangan. Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah dilaksanakan tapi belum optimal pelaksanaannya .

### 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dapat di jelaskan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dari masing-masing tujuan/sasaran adalah sebagai berikut:

#### **Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya**

##### 1. Meningkatnya Ketahanan Pangan

Tabel Analisis Tujuan 1.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Pangan	73,5	71,22	96,90

Dari Tujuan di atas terdapat satu (1) Sasaran Yaitu :

- 1.1. Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat.

Tabel Analisis Sasaran 1.1.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Skor Pola Pangan Harapan	92,5	93,5	101,08
Konsumsi Energi	2.140	2.117	98,93

Dari Tabel diatas untuk lebih rinci sebagai berikut :

#### **Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui skor PPH. Skor PPH Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Dibawah ini dapat dilihat tabel capaian keberhasilan Skor PPH tahun 2023-2024 sebagai berikut :

Tabel 5. Perkembangan Skor PPH Konsumsi Masyarakat dari Tahun 2023-2024

Uraian	2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Skor PPH	92	95	92,5	93,5

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur

Untuk perbandingan realisasi capaian kinerja Skor PPH Konsumsi tahun 2024 ini dibanding dengan target pada akhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel Perbandingan capaian Skor PPH Konsumsi Masyarakat Tahun 2024 dengan target Akhir Renstra tahun 2026

Uraian	2024		2026
	Target	Realisasi	Target
Skor PPH	92,5	93,5	93,2

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Timur

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2024 melebihi target capain target akhir Renstra tahun 2026, namun demikian kondisi saat ini menunjukkan konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, dimana masih tingginya konsumsi padi-padian, dan masih rendahnya konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, serta umbi-umbian. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain :

- a) Perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi;
- b) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam, bergizi, seimbang, dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan;
- c) Kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu;
- d) Berbagai bentuk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap bahan pangan inferior;
- e) Belum optimalnya kerjasama antar OPD serta lemahnya partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang melalui :

- a) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) melalui komunikasi, informasi, edukasi (penyusunan KIT dan modul penyuluhan di tingkat lapangan, lomba cipta menu B2SA, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik.
- b) Upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal
- c) Peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga.

### **Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/hari)**

Konsumsi energy perkapita per hari adalah nilai pangan yang dikonsumsi per kapita tiap hari dengan satuan Kkal, dengan memperhatikan rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan gizi /WNPG ke X tahun 2012 yaitu angka kecukupan energy /AKE 2.150 kkal/Kapita/hari .

Tabel Perkembangan Konsumsi Energi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Tahun 2023-2024

Uraian	2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Ketersediaan Konsumsi Energi	2.135	2.209,3	2.140	2.117

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Timur.

Berdasarkan tabel diatas konsumsi energi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perkembangan konsumsi energi tahun 2023-2024 mengalami Penurunan sebesar 4,18% pertahun. Pada Tahun 2023 konsumsi energy masyarakat sebesar 2.209,3 kkal/Kap/hari dan menurun menjadi 2.117 Kkal/Kapita/hari pada tahun 2024

Untuk perbandingan realisasi capaian kinerja Konsumsi Energi pada tahun 2024 adalah 2.117 dibanding dengan target pada akhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel Perbandingan capaian Konsumsi energi/Kkal/Kapita/hari tahun 2024 dengan target Akhir Renstra tahun 2026.

Uraian	2024		2026	Hasil Perbandingan
	Target	Realisasi	Target	
Ketersediaan Konsumsi Energi	2.140	2.117	2.150	98,47

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Timur.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi konsumsi energi untuk tahun 2024 hampir 98,47 % mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2026 hal ini disebabkan adanya peningkatan konsumsi pangan masyarakat .

## 2. Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

**Tabel 2.1.** Analis Capaian Kinerja Tujuan 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	88,30	88,14	99,82
Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	BB	BB	BB
Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Dari Tujuan di atas terdapat satu (1) Sasaran Yaitu :

### 2.1. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas kinerja dan keuangan.

**Tabel 2.1.** Analis Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	88,30	88,14	99,82
Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	BB	BB	BB
Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Berdasarkan tabel standar dan Katagori pengukuran Kinerja, bahwa Tahun 2024 persentase capaian kinerja untuk ketiga indikator diatas sebesar 96,80, 100 dan 100 dengan kategori sangat baik. Tahun 2024 realisasi capaian kinerja untuk kedua indikator atas adalah sebagai berikut :

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dari target 88,30 Poin telah terealisasi sebesar 88,14

2. Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Target BB Terealisasi BB
3. Laporan Keuangan sesuai dengan SAP

Pencapaian target indikator tersebut diatas didukung oleh pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 pada program penunjang urusan pemerintahan daerah.

### 3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Kondisi yang Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Sumber dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan Penyediaan infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Saat ini sumber dana masih terbatas dan penanganan Penyediaan infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan membutuhkan biaya yang besar	Masih membutuhkan sumber dana/anggaran yang dapat mendukung tujuan yang dimaksud	Mengajukan usulan anggaran melalui berbagai pendanaan, baik APBN (DAK), APBD Provinsi
	Jumlah Sumber Daya Manuasia yang mempunyai kompetensi di Bidang Pangan masih sangat Minim	Masih dibutuhkan Sumber Daya Manuasia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan	Mengusulkan untuk pemenuhan Sumber Daya Manuasia sesuai Analisis kebutuhan
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung operasional	Sarana dan prasarana yang ada saat ini belum maksimal	Masih membutuhkan alat, kendaraan operasional di lapangan guna menjangkau ke seluruh wilayah	Mengajukan usulan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda Empat

## 3.2. REALISASI KEUANGAN

Analisis Akuntabilitas Keuangan tahun 2024 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Program, kegiatan dan Subkegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.849.386.107,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.792.110.955,00 atau 98,82.% dengan capaian fisik kegiatan sebesar 100 %. Adapun rincian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 9. Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan 2024

No	Uraian	Tahun 2024
1	Renstra	5.413.839.651,00
2	Pagu	4.849.386.107,00
3	Realisasi	4.792.110.955,00

Secara lengkap, pagu dan realisasi penggunaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 per program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Jumlah dan Realisasi Penggunaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Tahun Anggaran 2024

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	%
5.1	BELANJA OPERASI	4.696.486.107	4.640.516.955	55.969.152	98,81
5.1.01.	BELANJA PEGAWAI	2.660.227.151	2.618.292.465	41.934.686	98,42
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.981.258.956	1.967.312.490	13.946.466	99,30
5.1.05.	BELANJA HIBAH	40.000.000	40.000.000	-	100,00
5.1.06.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	15.000.000	14.912.000	88.000,00	99,41
5.2	BELANJA MODAL	152.900.000	151.594.000	1.306.000	99,15
	JUMLAH BELANJA DAERAH	4.849.386.107	4.792.110.955	57.275.152	98,82
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.982.629.840	3.935.900.942	46.728.898	98,83
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.278.500	33.233.500	45.000	99,86
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.599.900	2.599.900	-	100,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.025.000	1.025.000	-	100,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.325.000	1.325.000	-	100,00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.025.000	1.025.000	-	100,00
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.424.900	1.424.900	-	100,00

1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.878.700	5.878.700	-	100,00
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	19.955.000	45.000	99,78
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.094.727.151	3.052.792.465	41.934.686	98,64
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.578.267.151	2.536.332.465	41.934.686	98,37
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	516.460.000	516.460.000	-	100,00
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	-	100,00
1.3.1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	10.000.000	-	100,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.464.189	295.499.529	964.660	99,67
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.245.640	20.163.500	82.140	99,59
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.984.149	128.152.280	831.869	99,36
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.966.000	49.966.000	-	100,00
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.973.400	9.973.400	-	100,00
1.4.5	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.995.000	4.950.000	45.000	99,10
1.4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.300.000	2.300.000	-	100,00
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	79.994.349	5.651	99,99
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	19.450.000	550.000	97,25
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	19.450.000	550.000	97,25
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.200.000	296.185.098	14.902	99,99

1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	5.500.000	-	100,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	290.700.000	290.685.098	14.902	99,99
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	231.960.000	228.740.350	3.219.650	98,61
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.860.000	112.041.350	2.818.650	97,55
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.100.000	45.955.000	145.000	99,69
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.000.000	70.744.000	256.000	99,64
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	517.344.346	507.561.320	9.783.026	98,11
2.1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	110.167.246	108.881.400	1.285.846	98,83
2.1.1	Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	110.167.246	108.881.400	1.285.846	98,83
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	552.821.080	548.392.490	4.428.590	99,20
3.1	Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	294.895.692	292.742.200	2.153.492	99,27
3.1.1	Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya	5.154.000	5.134.000	20.000	99,61

3.1.2	Sub kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	46.500.000	46.499.600	400	100,00
3.1.3	Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	54.055.892	52.635.800	1.420.092	97,37
3.1.4	Sub kegiatan Pemantauan Stok Pangan	88.144.500	87.756.500	388.000	99,56
3.1.5	Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tk Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	68.586.000	68.585.000	1.000	100,00
3.1.6	Sub kegiatan Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	2.105.500	2.105.500	-	100,00
3.1.7	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	30.349.800	30.025.800	324.000	98,93
3.2	Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/kota	147.120.800	145.831.490	1.289.310	99,12
3.2.1	Sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	103.500.000	102.241.440	1.258.560	98,78
3.2.2	Sub kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	43.620.800	43.590.050	30.750	99,93
3.3	Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	110.804.588	109.818.800	985.788	99,11
3.3.1	Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per kapita Per Tahun	5.347.300	5.347.300	-	100,00
3.3.2	Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	78.657.288	77.673.500	983.788	98,75
3.3.3	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan evaluasi Konsumsi Per kapita Per tahun	26.800.000	26.798.000	2.000	99,99
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	129.843.191	128.599.433	1.243.758	99,04

4.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	90.217.680	89.448.713	768.967	99,15
4.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	90.217.680	89.448.713	768.967	99,15
4.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.625.511	39.150.720	474.791	98,18
4.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	20.883.000	20.503.720	379.280	98,18
4.2.2	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	15.000.000	14.912.000	88.000	99,41
4.2.3	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten	3.742.511	3.735.000	7.511	99,80
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	73.924.750	70.336.690	3.588.060	95,15
5.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	73.924.750	70.336.690	3.588.060	95,15
5.1.1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	73.924.750	70.336.690	3.588.060	95,15

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, pengukuran efisiensi diambil dari selisih antara persentase capaian fisik kegiatan dengan persentase realisasi penyerapan anggaran. Adapun kriteria penilaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

Sangat Efektif	: >100%
Efektif	: 90-100
Cukup Efektif	: 80% -90%
Kurang Efektif	: 60%-80%
Tidak Efektif	: < 60%

Tabel 11. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

<i>PROGRAM</i>	<i>CAPAIAN FISIK (%)</i>	<i>PENYERAPAN ANGGARAN (%)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	100	98,83
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan	100	98,11
Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100	99,20
Program Penanganan Kerawanan Pangan	100	99,04
Program Pengawasan Keamanan Pangan	100	95,15
Jumlah 2024	100	98,82

Dari tabel efisiensi penggunaan sumberdaya diatas dan dilihat dari kriteria penetapan efisiensi anggaran belanja, setelah dilakukan penghitungan dengan mengikuti formula diatas adalah 98,82 Dengan itu dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dapat memenuhi kriteria “ Efektif antara capaian fisik kegiatan dengan penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan di tahun 2024.

### 3.3. PERBAIKAN PERENCANAAN KINERJA

Pada tahun 2024 Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak melaksanakan perbaikan Perencanaan Kinerja.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun Anggaran 2023 telah merealisasi visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan melalui Dana APBD II yang dituangkan dalam 5 (lima) program dan 14 (Empat belas kegiatan) dan 41 (Empat Puluh Satu) subkegiatan dan telah mencapai target yang diharapkan. Realisasi sebesar Rp. 4.792.110.955,- **dengan capaian keuangan sebesar 98,82%** dari total dana yang dianggarkan sebesar Rp.4.849.386.107,-. Dari uraian diatas, capaian kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dana APBD II , secara umum dari misi yang sudah ditetapkan dalam Renstra telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari pengukuran kinerja pada tingkat sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang ditentukan. Keberhasilan ini juga telah didukung penuh oleh kesungguhan seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan program/kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Walaupun secara umum Pemerintah sudah mampu menyediakan pangan dan mendistribusikannya secara merata keseluruh daerah, sehingga pangan mudah dijangkau, tetapi belum menjadi jaminan bahwa seluruh penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat memenuhi kebutuhan pangannya dalam jumlah jumlah yang cukup, bermutu, bergizi, berimbang, aman dan halal, sebagaimana dimanatkan oleh peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan, karena pada kenyataannya masih terdapat sebagian masyarakat yang tinggal didaerah rawan pangan yang belum mampu mengakses pangan. Kondisi tersebut disebabkan karena rendahnya kemampuan daya beli masyarakat yang sangat berkaitan dengan faktor kemiskinan

### 4.2. Rekomendasi

Berdasarkan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdapat beberapa rencana strategis yang dirancang untuk mencapai target kinerja pada Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi maka diperlukan suatu penyempurnaan metode pengembangan Kinerja PNS
2. Pengembangan dan integrasi aplikasi serta penggunaan kecerdasan dalam seluruh layanan kepegawaian dalam Merespon dinamika dan perubahan organisasi.
3. Perlunya Peningkatan Sumber daya manusia melalui pelatihan atau bimbingan teknis pada Pejabat fungsional.

Semoga LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan memberikan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabak, 19 Februari 2025

Kepala Dinas,



**PAJAR ALAMSYAH,SE**

Pembina TK.I ( IV/b)

NIP. 19801122 200604 1 009

